BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Strategi pemerintah daerah dalam rangka pengembangan pariwisata di Kabupaten Kerinci guna mendukung Program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

1.1.1 Tahapan Implementasi program Program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

1. Perencanaan (*Planning*) adalah tindakan memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi- asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan.¹² Dalam hal ini, terdapat empat aspek perencanaan yaitu, penentuan visi dan misi, perumusan kebijakan, penentuan anggaran dan penentuan target organisasi.

Menurut Bapak Leo:¹³

“Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci telah melakukan perencanaan keempat aspek tersebut sesuai aturan yang berlaku, kemudian dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis yang disusun setiap lima tahun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019. Rencana Strategis tersebut selanjutnya diuraikan secara operasional dalam rencana kerja tahunan”

¹²*Ibid*

¹³Hasil Wawancara Dengan Bapak Leo Selaku Kabid Bidang Destinasi Wisata DinasPariwisata Kabupaten Kerinci, Pada 8 Februari 2021.

Pada tahapan perencanaan, bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci terkendala dengan belum adanya dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah. Hal ini menyebabkan sinergisitas perencanaan program pengembangan destinasi pariwisata Kabupaten Kerinci dengan program pembangunan sektor lainnya menjadi tidak optimal. Menurut Ibu Ningsih:¹⁴

“Disamping itu, terbatasnya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kerinci untuk sektor pariwisata, sehingga kegiatan yang dapat direncanakan pun menjadi terbatas pula”

Hal itu juga ditemukan dalam pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Kerinci, dimana alokasi anggaran tidak sebagaimana yang direncanakan. Sebagaimana hasil wawancara dan studi dokumentasi, dalam upaya mewujudkan visi “Terwujudnya Kerinci sebagai daerah tujuan wisata yang unggul berdaya saing, berkelanjutan dan berbasis kekayaan alam dan budaya menuju Kerinci lebih baik” hanya didukung oleh rata-rata tiga jenis kegiatan untuk program pengembangan destinasi pariwisata Kabupaten Kerinci per tahun. Bapak Leo menyebutkan:¹⁵

¹⁴Hasil Wawancara Dengan Ibu Surya Ningsih Selaku Staff Bidang PAD DinasPariwisata Kabupaten Kerinci, Pada 8 Februari 2021.

¹⁵Hasil Wawancara Dengan Bapak Leo Selaku Kabid Bidang Destinasi Wisata DinasPariwisata Kabupate Kerinci, Pada 8 Februari 2021.

“Kegiatan tersebut meliputi: pertama, peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, kedua, peningkatan pelayanan teknis pariwisata di tiga UPTD, dan ketiga, pengadaan fasilitas Objek Daya Tarik Wisata (ODTW). Disamping itu, kendala lainnya ialah belum adanya kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci dengan pihak Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dalam pengelolaan objek wisata, padahal hampir separuh objek wisata yang ada di Kabupaten Kerinci berada dalam kawasan TNKS dan semuanya berpotensi untuk dikembangkan.”

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa aspek perencanaan, perlu dilakukan penyempurnaan dengan melibatkan semua pihak terkait terutama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pihak swasta, TNKS, dan masyarakat sekitar lokasi wisata.

2. Pengorganisasian (*Organizing*) adalah tindakan mengusahakan hubungan- hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerjasama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran

.¹⁷Hasil Wawancara Dengan Ibu Irpelita Selaku Staff Bidang Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Kerinci, Pada 8 Februari 2021.

¹⁸Hasil Wawancara Dengan Bapak Leo Selaku Kabid Bidang Destinasi Wisata DinasPariwisata Kabupate Kerinci, Pada 8 Februari 2021

tertentu. Berdasarkan hasil penelitian, dikemukakan oleh Ibu Iripelita:¹⁷

“Pengorganisasian yang dilakukan bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci menggunakan garis organisasi dan instruksi. Pengaturan tugas dan fungsi mengacu pada peraturan daerah Kabupaten Kerinci nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci dan masing-masing unit telah memahami tugas dan fungsi masing-masing.”

Bidang pengembangan destinasi pariwisata merupakan satu diantara lima bidang di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci yang bertanggungjawab terhadap program pengembangan destinasi pariwisata.. Menurut Bapak Leo:¹⁸

Dengan demikian penulis berpendapat bahwa bidang pengembangan destinasi pariwisata sendiri mengalami keterbatasan sumber daya manusia, karena hanya satu orang yang berlatar belakang pendidikan kepariwisataan. Hal ini menyebabkan pembagian beban tugas yang diterima para pegawai terkadang belum sesuai dengan kualifikasi pendidikannya, sehingga kinerja aparatur belum terwujud sebagaimana

.¹⁷Hasil Wawancara Dengan Ibu Iripelita Selaku Staff Bidang Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Kerinci, Pada 8 Februari 2021.

¹⁸Hasil Wawancara Dengan Bapak Leo Selaku Kabid Bidang Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kabupate Kerinci, Pada 8 Februari 2021

yang diharapkan.

.¹⁷Hasil Wawancara Dengan Ibu Irpelita Selaku Staff Bidang Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Kerinci, Pada 8 Februari 2021.

¹⁸Hasil Wawancara Dengan Bapak Leo Selaku Kabid Bidang Destinasi Wisata DinasPariwisata Kabupate Kerinci, Pada 8 Februari 2021

Peningkatan kemampuan pegawai selama ini dilakukan melalui pelatihan, walaupun intensitas pelaksanaannya masih terbatas untuk aparatur yang ada. Kendala lainnya, sampai saat ini belum terbentuk tim koordinasi pengembangan pariwisata lintas OPD, sehingga terkesan bahwa pengembangan pariwisata di Kabupaten Kerinci hanya tanggung jawab Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga saja, karena peran OPD lain belum optimal. Keberadaan Tim ini, dianggap sangat penting sebagai wadah koordinasi lintas sektor, akan tetapi penetapannya secara formal belum terlaksanakan.

3. Penggerakan (*Actuating*) merupakan usaha untuk menciptakan iklim kerja sama diantara staf pelaksana program sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.¹⁹ Menurut Bapak Leo:²⁰

¹⁹*Ibid*

²⁰Hasil Wawancara Dengan Bapak Leo Selaku Kabid Bidang Destinasi Wisata Dinas

“Setelah pembagian tugas dan fungsi masing-masing staf, kemudian para staf melaksanakannya sesuai dengan instruksi pimpinan. Sementara itu, untuk kegiatan lainnya seperti peningkatan sarana dan prasarana pariwisata dan pengembangan kelompok sadar wisata atau kelompok sejenis lainnya dilakukan oleh unit yang ada di Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci. Semua kegiatan pada program Pengembangan Destinasi Pariwisata telah terlaksana dengan baik”

Hal ini terlihat pada keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sebagaimana yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan yang telah disusun dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP).

Menurut Bapak Leo²¹

“Pada fungsi manajemen penggerakan, terdapat kendala yaitu belum tersedianya anggaran di APBD termasuk belum adanya dukungan anggaran dari APBD Provinsi Jambi dan APBN yang secara khusus untuk pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Kerinci. Kemudian fakta lain yang terjadi adalah masih kurang keterlibatan pihak swasta dan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata.”

Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh belum maksimalnya dukungan pemerintah, pihak swasta, masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya dalam pengembangan destinasi wisata unggulan.

²¹Hasil Wawancara Dengan Bapak Leo Selaku Kabid Bidang Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Kerinci, Pada 8 Februari 2021.

4. Pengawasan (*Controlling*) dapat diartikan sebagai usaha menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara menilai hasil atau prestasi yang dicapai dan kalau terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan maka segera diadakan usaha perbaikan sehingga semua hasil atau prestasi yang dicapai sesuai dengan,²²Menurut Bapak Leo:²³

“Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian oleh bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci terhadap program yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya telah dijalankan sesuai dengan ketentuan.Hal ini dibuktikan dengan adanya rapat evaluasi rutin internal minimal pertriwulan dan kegiatan monitoring dan evaluasi lainnya dengan tetap mempedomani aturan dan ketentuan yang ada.Hasil pengawasan dan pegendalian tersebut terangkum pula dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan dokumen evaluasi terkait lainnya.”

Pengembangan subsektor pariwisata berdasarkan penelitian terdahulu terbukti berpengaruh positif pada peluang usaha dan kesempatan kerja. Dengan adanya kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan asing ke suatu lokasi wisata maka akan membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar kawasan seperti usaha restoran, jasa pengangkutan dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan pengunjung.

Partisipasi masyarakat merupakan refleksi dari dukungan dalam menyikapi

²¹Hasil Wawancara Dengan Bapak Leo Selaku Kabid Bidang Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Kerinci, Pada 8 Februari 2021.

suatu program. Semakin tinggi dukungan masyarakat maka akan semakin tinggi partisipasi masyarakat di dalamnya. Menurut Bapak Leo:

“Pertumbuhan subsektor pariwisata selain membawa dampak positif dari aspek ekonomi juga membawa dampak negatif terhadap aspek sosial dan lingkungan seperti eksploitasi sumber daya alam dan objek-objek buatan manusia yang merubah kondisi alami dari kawasan wisata. Selain itu dampak pariwisata akan memengaruhi kondisi sosial dari masyarakat yang ada karena budaya dan peradaban yang datang dari luar daerah. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kerinci akan dapat menciptakan keberlanjutan apabila dalam kebijakan tersebut tercermin prinsip-prinsip adil dan tidak membedakan pihak manapun yang berkepentingan dengan kegiatan pariwisata.”

Adanya keadilan dalam penyusunan kebijaksanaan (prosedural justice), keterlibatan peran dari pemerintah, swasta, dan masyarakat setempat untuk menciptakan sinergi, kelenturan (flexibility) dalam artian bersifat kontekstual dan kondisional, pembangunan berbasis partisipasi masyarakat dalam artian pembangunan itu dimaksudkan untuk melayani minat masyarakat yang bekerja dan berdomisili di sekitar lokasi wisata dan harus berwawasan lingkungan serta terdapat unsur konservasi untuk mempertahankan nilai estetika dari lingkungan tersebut.

3.1.2 Strategi dalam kebijakan pengoptimalan program Kawasan

Strategis Pariwisata Nasional

Dalam pemanfaatan kawasan objek wisata di Kabupaten Kerinci maka dibutuhkan arahan strategi dalam kebijakan pengoptimalan dengan memerhatikan keseluruhan faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

1. Faktor Kekuatan (strength), yang dimiliki Kabupaten Kerinci seperti telah diuraikan pada bagian awal, yaitu banyaknya tempat/kawasan alam yang indah dan asri. Kemudian faktor kekuatan lain adalah seni dan budaya masyarakat yang masih selalu terjaga adat istiadatnya. Demikian juga dari pemerintah daerah yang setiap tahunnya mengadakan festival seni dan budaya, dalam rangka menarik wisatawan untuk datang dan berkunjung ke Kabupaten Kerinci. Selain itu dengan memerhatikan besarnya potensi kepariwisataan, pemerintah daerah secara bertahap telah berupaya melakukan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana pariwisata sebagaimana tertuang di dalam RPJMD.
2. Faktor Kelemahan (weaknesses), yang menjadi kendala atau kelemahan dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Kerinci di antaranya adalah aksesibilitas menuju Kabupaten Kerinci yang tidak strategis dan relatif sulit dijangkau. Akses ke Kabupaten Kerinci dengan transportasi darat dari daerah lain cukup jauh dan tidak didukung oleh infrastruktur jalan yang baik hanya 21,6 persen kondisi jalan yang baik. Sedangkan transportasi udara yang seharusnya bisa membuka akses juga tidak didukung oleh kondisi Bandar Udara Depati Parbo yang masih kecil dan terbatas.

3. Faktor Peluang (opportunities), terdapat banyak kesempatan dan peluang bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten Kerinci. Masyarakat Kerinci banyak yang berada diluar daerah, sehingga hal ini menjadi alternatif media promosi secara tidak langsung. Selanjutnya sejalan dengan pendapat Suarto (2017) bahwa peluang akan dapat diciptakan apabila adanya kawasan wisata sehingga menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat seperti berjualan berupa makanan ataupun menawarkan jasa untuk lebih mengenal kawasan objek wisata selain itu juga bisa melakukan aktivitas wiraswasta bagi masyarakat yang berminat di kawasan objek wisata.
4. Faktor Ancaman (treaths), dalam pengembangan kawasan wisata antara lain adalah dari aspek lingkungan dari perilaku yang tidak bertanggung jawab oleh pengunjung atau masyarakat yang dapat memengaruhi pencemaran lingkungan, adanya pertentangan budaya yang dibawa dari luar terhadap masyarakat Kerinci yang terkenal masih memegang teguh agama dan adat budaya. Wilayah Kabupaten Kerinci 59,82 persen merupakan Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), hanya 40,18 persen yang merupakan lahan budidaya dan pemukiman. Kondisi tersebut berpotensi menjadi hambatan akan tumpang tindih dalam pemanfaatan lahan dan pengembangan kawasan.

Formulasi strategi yang disusun berdasarkan unsur-unsur kekuatan, kelemahan,

peluang dan tantangan. Terdapat 7 (tujuh) strategi kebijakan yang bisa dilakukan dalam rangka pengembangan kawasan wisata di Kabupaten Kerinci yaitu:

1. Pengembangan Kawasan Berbasis Partisipasi Masyarakat.

Menurut Ibu Irpita:²²

“Strategi yang dilakukan dengan memberikan peluang usaha bagi sektor ekonomi masyarakat kecil dan menengah adalah dikarenakan pada pengembangan kawasan wisata di Kabupaten Kerinci mendapat dukungan dari masyarakat dan pemerintah”

Pengembangan kawasan wisata cukup bagus sehingga terjadi peningkatan pendapatan masyarakat walaupun peningkatan ini masih belum begitu besar namun hal ini wajar mengingat pengembangan kawasan wisata ini telah dan masih sedang dilakukan.

2. Pembinaan Masyarakat yang Sadar Wisata. Strategi peningkatan kualitas SDM perlu dilakukan karena jika masyarakat tidak mampu membaca peluang-peluang yang ada di bidang pariwisata maka akan sangat sulit untuk mencapai tujuan pengembangan kawasan wisata yakni peningkatan pendapatan, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan PAD.

²²Hasil Wawancara dengan Ibu Irpita selaku Staff Bidang Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Kerinci, pada 8 Februari 2021.

3. Diversifikasi Usaha/Menciptakan Produk Wisata yang Bisa Menjadi Ciri Khas Daerah yang Berbeda dengan Daerah Lainnya. Pemerintah hendaknya mampu memfasilitasi masyarakatnya yang masih mempunyai keterbelakangan pendidikan untuk mendapatkan pelatihan kepariwisataan agar mampu menciptakan diversifikasi usaha. Dengan beragamnya usaha- usaha yang mampu dilakukan oleh masyarakat maka akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan akhirnya akan meningkatkan barang dan jasa dan meningkatkan PAD.

Selanjutnya masyarakat Kabupaten Kerinci harus mampu menciptakan peluang produk-produk yang beragam karena Kabupaten Kerinci mempunyai potensi dan sumber daya yang melimpah. Pemerintah melalui dinas terkait (seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah) mestinya mampu memberikan pelatihan pada masyarakat lokal dalam bentuk pelatihan dan pembinaan usaha seperti kelompok usaha bersama yang mampu menciptakan produk yang berbeda dengan daerah lain yang menjadi ciri khas dari Kota kerinci.

Selama ini partisipasi aktif dari masyarakat hanya sebatas

penjualan makanan dan minuman ringan saja. Dengan adanya pembinaan dari pemerintah diharapkan kedepannya industri kreatif dibidang pariwisata dapat meningkat.

4. Menumbuhkan Gerakan Sadar Wisata “Tradisi Mudik/Pulang Kampung”.

Menurut Ibu Irpita:²³

“Strategi ini diperlukan supaya masyarakat lokal baik yang berada di wilayah Kabupaten Kerinci maupun masyarakat Kerinci yang berada di luar daerah “merantau” mampu dan mau membaca setiap peluang di bidang pariwisata yang ada dan mampu mengemasnya sehingga mampumenarik wisatawan.”

Masyarakat yang sadar wisata mampu melihat bahwa adanya pengunjung/wisatawan baik asing maupun nusantara merupakan sumber penghasilan bagi mereka melalui usaha-usaha di bidang kepariwisataan. Masyarakat lokal hendaknya mempunyai rasa wisata yang tinggi yang bisa menarik dan mengajak wisatawan untuk datang dan kembali lagi ke lokasi wisata di Kabupaten Kerinci.

5. Melestarikan Budaya Lokal Sebagai Keunikan Wisata. Salah satu dampak negatif yang dapat terjadi dengan adanya pengembangan subsektor pariwisata adalah perubahan pola hidup dan perubahan budaya sehingga di sini strategi yang dapat dilakukan adalah dengan tetap memelihara kegiatan nilai-nilai lokal yang bisa ditumbuhkan dengan koordinasi di sekolah dan penyuluhan-penyuluhan norma yang berlaku di masyarakat.

²³Hasil Wawancara dengan Ibu Irpita Selaku Staff Bidang Destinasi Wisata DinasPariwisata Kabupaten Kerinci, Pada 8 Februari 2021.

Dengan tidak bergesernya nilai-nilai agama yang berlaku maka meskipun ada pengembangan subsektor pariwisata maka dampak negatif dari pengembangan subsektor pariwisata dapat dihindarkan. Budaya lokal yang tetap terjaga ini juga dapat menjadi keunikan dan daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk datang ke Kabupaten Kerinci. Strategi Lain yang perlu dilakukan dalam kegiatan pengembangan kawasan wisata yang berdampak pada perubahan lingkungan.

Pemerintah hendaknya mampu menanamkan pada masyarakatnya agar mencintai lingkungan dengan memberikan himbauan agar tidak melakukan pengrusakan lingkungan, menyediakan sarana dan prasarana kebersihan sehingga lingkungan yang bersih dan rapi dapat terjaga yang pada akhirnya memberikan kesan nyaman dan indah pada wisatawan.

6. Pemanfaatan RUTR sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; untuk mengatasi masalah-masalah pemanfaatan ruang yang saling tumpang tindih dan adanya kerusakan lingkungan maka pemerintah dapat melakukan strategi pengembangan kawasan wisata dengan tetap mengacu pada aturan-aturan yang berlaku

seperti mengacu pada Undang-Undang Tata Ruang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan mengacu pada RTRW Kabupaten Kerinci. Agar efek-efek negatif dari pengembangan sektor wisata dapat ditekan maka harus ada strategi penegakan hukum yang tegas terhadap setiap kegiatan kegiatan yang mengakibatkan kerugian pada lingkungan dan sosial masyarakat.

7. Peningkatan promosi dan publikasi agar Kabupaten Kerinci dapat dikenal oleh daerah lain maka dilakukan strategi promosi-promosi daya tarik wisata Kabupaten Kerinci. Strategi ini dapat sejalan dengan strategi di mana promosi dan publikasi melalui masyarakat lokal yang di perantauan dapat menjadi alternatif media promosi yang sangat efektif. diperlukan promosi dalam menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke daerah ini dan juga tingkat ketertarikan masyarakat untuk berkunjung ke Provinsi Jambi.

3. 2. Dampak dari Implementasi Strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kerinci

Perkembangan kepariwisataan saat ini telah memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah, namun harus diakui pula bahwa hasil yang sedang dinikmati saat ini belum mencapai titik yang optimal. Sejalan dengan itu, berbagai langkah kebijakan yang ditempuh dalam pengembangan kepariwisataan di daerah ini, baik yang sifatnya pembinaan/penyuluhan, menggali dan mengembangkan potensi wisata yang ada menjadi sumber PAD, serta penataan dan peningkatan sarana dan prasarana walaupun belum mencapai target yang diharapkan.

Melalui langkah dan upaya tersebut telah mampu mendinamisasikan perkembangan sektor pariwisata antara lain tercemin dari penambahan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Kerinci agar mampu menggairahkan sektor pariwisata daerah. Pertumbuhan arus kunjungan wisatawan rata-rata per tahun dapat dikatakan tinggi, yakni rata-rata sebesar $\pm 82,2\%$ untuk wisatawan Nusantara, sementara untuk wisatawan manca negara, rata-rata per tahun sebesar $58,6\%$. Seiring dengan pencapaian keberhasilan dan hambatan-hambatan yang dialami, pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah

Kabupaten Kerinci, telah menetapkan berbagai kebijakan untuk pengembangan pariwisata daerah dalam rangka menjadikan sektor ini sebagai salah satu sektor andalan yang dapat memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah. Kebijakan-kebijakan tersebut telah memberikan hasil

belum optimal. Hasil-hasil yang dicapai tersebut tentunya merupakan gambaran dari hasil kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. Artinya, bahwa berbagai tindakan yang ditempuh dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Kerinci, telah memberikan hasil dan dampak yang positif, pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pendapatan daerah, walaupun belum optimal.

Kabupaten Kerinci merupakan satu-satunya kabupaten/kota berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 920/ KEP.GUB/ DISBUDPAR.1/ IX/ 2016 tentang Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kerinci sebagai branding pariwisata Provinsi Jambi. Penetapan ini berdasarkan kajian bahwa Kabupaten Kerinci memiliki keunggulan potensi wisata baik dari aspek kuantitas, kualitas maupun daya tarik dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Keunggulan destinasi wisata di Kabupaten Kerinci yaitu destinasi alam, dimana satu-satunya daerah yang berada di daerah dataran tinggi dan tepatnya dibawah Gunung Kerinci, yaitu gunung tertinggi di Pulau Sumatera. Laporan Badan Pusat Statistik tahun 2017 mencatat, bahwa di Provinsi Jambi terdapat 193 objek wisata alam, 98 diantaranya berada di Kabupaten Kerinci. Bapak Leo selaku Kabid Bidang Destinasi Wisata Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kerinci menyatakan:²⁴

²⁴Hasil Wawancara Dengan Bapak Leo Selaku Kabid Bidang Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Kerinci, Pada 8 Februari 2021.

“Dengan adanya program KSPN tersebut Kabupaten Kerinci mendapatkan dana DAK, namun penetapan Kabupaten Kerinci sebagai branding pariwisata belum disertai dengan pengelolaan destinasi seperti yang diharapkan”

Kondisi ini mengakibatkan belum terjadinya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan secara signifikan khususnya wisatawan mancanegara. Pada akhirnya sehingga sektor pariwisata belum mampu mendorong percepatan pengembangan sektor perekonomian masyarakat dan belum berkontribusi banyak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kerinci. Setelah tiga tahun penetapan Kabupaten Kerinci sebagai branding pariwisata Provinsi Jambi, data menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kerinci belum meningkat secara signifikan. Bapak Leo menjelaskan bahwa:²⁵

“Kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Kerinci dari tahun 2013 sampai tahun 2018 mengalami fluktuasi. Kenaikan secara pesat hanya terjadi pada tahun 2016 yakni mencapai 7.465 orang, ini merupakan tahun pertama ditetapkannya Kabupaten Kerinci sebagai branding Pariwisata Provinsi Jambi. Namun pada tahun 2017 terjadi penurunan sekitar 61% kemudian pada tahun 2018 terjadi kenaikan kembali sebesar 115%. “

Berdasarkan analisa tersebut maka dapat disimpulkan bahwa belum ada tren kenaikan secara berarti pada angka kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Kerinci sejak ditetapkannya Kabupaten Kerinci sebagai branding pariwisata Provinsi Jambi. Bapak Leo berpendapat bahwa:

“Sedikit berbeda dengan apa yang terjadi pada angka kunjungan wisatawan domestik, yakni tren kenaikan terjadi dari tahun 2013 sampai dengan 2018. Pada tahun 2016 justru terjadi penurunan sebesar 5%, tetapi pada tahun 2017 kembali terjadi kenaikan sebesar 105 % dan tahun 2018 kenaikan hanya mencapai sekitar 60 %.¹

²⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Leo Selaku Kabid Bidang Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kabupate Kerinci, Pada 8 Februari 2021.

Artinya, pada angka kunjungan wisatawan domestik juga belum terjadi kenaikan secara signifikan. Kondisi ini mempengaruhi angka capaian PAD Kabupaten Kerinci. Berikut ini disajikan grafik data perkembangan kontribusi retribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Kerinci selama lima tahun terakhir. Menurut Bapak Leo”

“Kontribusi retribusi dari sektor pariwisata terhadap PAD dari tahun 2013 sampai tahun 2018 rata-rata hanya 0,6 %.”²⁶

Artinya, selama hampir tiga tahun sejak diberlakukannya Kabupaten Kerinci sebagai branding Pariwisata Provinsi Jambi ternyata belum mampu meningkatkan secara signifikan angka kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Kerinci. Sedikitnya jumlah kunjungan wisatawan yang mengakibatkan kecilnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Kerinci menunjukkan belum maksimalnya pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Kerinci, Salah satunya dipengaruhi oleh faktor manajemen pengelolaannya.

Pada akhirnya sektor pariwisata belum mampu mendorong percepatan pengembangan sektor perekonomian masyarakat dan belum berkontribusi banyak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kerinci. Setelah tiga tahun penetapan Kabupaten Kerinci sebagai *branding* pariwisata Provinsi Jambi, data menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kerinci belum meningkat secara signifikan. Bapak Leo menjelaskan bahwa:²²

²⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Leo Selaku Kabid Bidang Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kabupate Kerinci, Pada 8 Februari 2021.

“Kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Kerinci dari tahun 2013 sampai tahun 2018 mengalami fluktuasi. Kenaikan secara pesat hanya terjadi pada tahun 2016 yakni mencapai 7.465 orang, ini merupakan tahun pertama ditetapkannya Kabupaten Kerinci sebagai branding Pariwisata Provinsi Jambi. Namun pada tahun 2017 terjadi penurunan sekitar 61% kemudian pada tahun 2018 terjadi kenaikan kembali sebesar 115%”

Berdasarkan analisa tersebut maka dapat disimpulkan bahwa

belum ada kenaikan secara berarti pada angka kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Kerinci sejak ditetapkannya Kabupaten Kerinci sebagai *branding* pariwisata Provinsi Jambi

Ibu Ningsih berpendapat bahwa:

“Sedikit berbeda dengan apa yang terjadi pada angka kunjungan wisatawan domestik, yakni tren kenaikan terjadi dari tahun 2013 sampai dengan 2018. Pada tahun 2016 justru terjadi penurunan sebesar 5%,

tetapi pada tahun 2017 kembali terjadi kenaikan sebesar 105 % dan tahun 2018 kenaikan hanya mencapai sekitar 60 %”²⁷

Artinya, pada angka kunjungan wisatawan domestik juga belum terjadi kenaikan secara signifikan. Kondisi ini mempengaruhi angka capaian PAD Kabupaten Kerinci. Berikut ini disajikan grafik data perkembangan kontribusi retribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Kerinci selama lima tahun terakhir.

²⁷Hasil Wawancara dengan Ibu Ningsih Selaku Staff Bidang Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Kerinci, pada 8 Februari 2021.

Tabel 2.3
Rekap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Pariwisata
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci Tahun
2014-2019

No	Tahun	Target	Jumlah Realisasi PAD	Persentase (%)
1	2014	320.000.000	308.362.000	96,36
2	2015	360.000.000	409.600.000	113,78
3	2016	470.000.000	458.300.000	97,51
4	2017	670.000.000	515.100.000	76,88
5	2018	680.000.000	513.536.000	75,52
6	2019	725.000.000	572.400.000	78,95

Dari tabel 2.3 dan dari penjelasan sebelumnya dapat dilihat bahwa Kabupaten Kerinci mempunyai nilai PAD yang terus meningkat setiap tahunnya, namun persentase antara target dan realisasi PAD Kabupaten Kerinci belum mencapai hasil yang maksimal, hal ini membuktikan bahwa Program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional belum dijalankan dengan optimal dan kurang efektifnya kinerja yang dihasilkan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kerinci.